EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANG) DIDESA AKA-AKAE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NURHALISA

Prodi administrasi publik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah rappang
nurhalisaamn@gmail.com

Abstrak

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan wahana public yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan desa. Salah satu desa yang patut dicermati pelaksanaan musrenbangdesnya adalah Desa Pulau Komang Sentajo dimana dalam proses penyelenggaraan musrenbang yang dilaksanakan ini, banyak sekali terdapat fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah keterlibatan masyarakat dan stakeholders guna menyelaraskan rencana pembangunan melalui musrenbangdes. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan internet searching. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan serta mengkajinya dengan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Musrenbangdes

PENDAHULUAN

Desa merupakan basis kekuatan so-sial ekonomi politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Oleh karena itu dalam menunjang sebuah pembangunan nasional, maka pembangunan di daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dimana pembangunan daerah tersebut harus dibangun dari terwujudnya pembangunan di desa. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, desa telah berkembang dan mengalami metamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera (Mirayansi & Fiansi, 2020).

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat, dan apabila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Mengenai pembangunan desa dengan adanya perubahan struktur masyarakat, maka dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat berarti memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya dengan pemahaman seperti ini, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan

Desa yang sah. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab.(Mustanir & Darmiah, 2016)

Peranan aparatur pemerintah desa sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Desa sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas hampir 80% berada di pedesaan, maka sudah sepatutnya usaha pembangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera(Mustanir et al., 2018).

Salah satu kegiatan perencanaan pembangunan yang biasanya dilaksanakan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yaitu forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. (Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang, 2008 :3).

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musyawarah perencanaan pembangunan yang menurut Sumpeno (2008:28) merupakan perencanaan pembangunan bersama masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan(Mustanir & Yasin, 2018)

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Evaluasi

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. (syukri akhmad, 1386).

B. Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. (Latif et al., 2019).

Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya. Tim Kerja Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang dalam Ahmad Mustanir (2016) (Mustanir & Rusdi, 2019)

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Musrenbang adalah Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan 16 . Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat

memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya (Mustanir & Abadi, 2017).

(Ahmad 2015: 32; Nared, Razpotnik Viskoovic, Cremer-Schulte, Brozzi, & Cortines Garcia, 2015; Mckenna-Cress & Kamien, n.d ; Kariuki & Njuki, 2013; Hossen, 2016; Bhattacharyya, 2004) mengungkapkan bahwa garis-garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penetapan program-program pembangunan
- b. Perencanaan pembangunan berdasar pada masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat.
- c. Perencanaan pembangunan di desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depannya.
- d. Perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan perdamaian (Kepemimpinan et al., 2019)

Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran (Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, 2019).

C. Pemerintah Desa

S. Pradja (26: 2014) dalam menjelaskan pemimpin dan kepemimpinan, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, di antaranya: pertama, kekuasaan dan kewenangan, yaitu kemampuan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya agar mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Kedua, kewibawaan, yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki seorang pemimpin, sehingga membedakan dengan yang di pimpinnya, dan dengan keunggulan tersebut, orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang di kehendaknya. Ketiga, kemampuan, yaitu keseluruhan daya, baik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain (Mustanir & Jaya, 2016).

Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan yang menurut Surianingrat dalam (Faried, 2015) sebagai sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tidak saja diarahkan pada pemerintahan yang berdaulat dan yang tidak berdaulat. Pengertian tentang “pemerintahan” sebagaimana dirumuskan adalah suatu pengertian yang berlaku umum, namun yang paling memberikan arahan pemikiran terhadap pemerintahan sebagai studi, sebagai suatu hal yang dipelajari, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, bahwa pengertian tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pemahaman terhadap pemerintahan yang berdaulat.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban(Mustanir et al., 2020).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Mustanir et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan pendekatan kualitatif.

Menurut Jauhari (2010 : 38) penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya.

Menurut Arikunto (2010 : 278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.(syukri akhmad, 1386).

PEMBAHASAN

Pesan pembangunan yang seharusnya disebarkan oleh masyarakat juga harus diseleksi, tidak semua pesan pembangunan harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Agen pembaharu harus mampu menjadi filter pesan pembangunan, pesan pembangunan harus memenuhi kriteria layak sebagai pesan pembangunan. Sebagai suatu inovasi, pesan pembangunan harus memenuhi 5 sifat utama yakni : adanya keuntungan relatif, keterhubungan dengan nilai-nilai, kebutuhan klien, dan inovasi yang dikenal sebelumnya, tingkat kerumitan yang rendah, mudah dicoba dan diamati. Pesan pembangunan juga harus dikemas dalam bahasa atau cara penyampaian kepada klien disajikan semenarik mungkin sehingga bantuan media akan sangat membantu baik bersifat visual, audio atau audio visual.

Sasaran pembangunan masyarakat adalah seluruh lapisan masyarakat yang heterogen, mereka memiliki karakter yang beragam pula. Oleh karenanya sebagai agen perubahan harus mampu memahami semua karakter klien, baik itu tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, budaya, bahasa, kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakininya. Agen pembaharu harus mampu memilih berbagai karakter masyarakat yang menghambat atau percepat perubahan yang kita harapkan. Pendekatan yang

harus dilakukan kepada setiap golongan tersebut juga tidak sama, yang paling penting adalah bahwa pada akhirnya semua lapisan atau golongan masyarakat mau menerima dan melakukan perubahan demi perbaikan mutu hidupnya(Mustanir et al., 2020)

Menurut pengamatan peneliti dengan adanya musyawarah perencanaan desa (musrembangdes) sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan yang ada di desa , dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Dan untuk kedepannya dapat di tingkatkan lagi.(syukri akhmad, 1386).

KESIMPULAN

Menurut pengamatan peneliti dengan adanya musyawarah perencanaan desa (musrembangdes) sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan yang ada di desa , dan semuanya sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Dan untuk kedepannya dapat di tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepemimpinan, A., Optimalisasi, T., Pada, M., & Pembangunan, P. (2019). *Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang*. 1–20. <https://doi.org/10.20956/xxxxxx>
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Mirayansi, & Fiansi. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana DEsa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Buntuna Kecamatan Baolan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1), 50–61.
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang D. *Journal of Government Science (GovSci)*, 2020(2), 84–108.
- Mustanir, A., & Jaya, I. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 84–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/430>
- Mustanir, A., Kamarudding, S., Akhwan, A., Madaling, & Mutmainna. (2018). Peranan Aparatur Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2(Desember), 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Mustanir, A., & Rusdi, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten

Sidenreng Rappang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 467–475. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>

Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). *Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. 8(2), 21–31.

Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>

syukri akhmad. (1386). *No Title*□□□□□ □□ □□. 283.